



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Literasi Digital

Isu Strategis

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat seluruh dunia diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu salah satunya adalah melakukan interaksi sosial secara daring, baik pekerjaan, komunikasi casual, ataupun pendidikan. Adaptasi masyarakat terhadap transformasi digital saat ini menjadi suatu keharusan, hal ini disadari oleh Presiden Joko Widodo, dalam pidato “Visi Indonesia” tanggal 14 Juli 2019 disebutkan 5 Visi Presiden Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, keterbukaan informasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Lalu dilanjutkan pada tanggal 4 Agustus 2020 terdapat 5 arahan Presiden untuk Percepatan Transformasi Digital dimana didalamnya terdapat arahan Persiapan kebutuhan SDM talenta digital.

Semangat tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu dengan adanya sasaran terkait Transformasi Digital. Penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa negara menyediakan fasilitas pendukung transformasi digital untuk peningkatan literasi digital masyarakat. Kebijakan ini disambut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu pada salah satu arah kebijakan “Mengembangkan SDM Talenta Digital dan Ekosistem Ekonomi Digital” yang dilakukan dengan strategi mengakselerasi kompetensi SDM Talenta Digital dan meningkatkan literasi digital di masyarakat.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari internetworldstats, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ke-3 di Asia yaitu dengan pengguna internet sebanyak 212 juta atau memiliki penetrasi pengguna internet 76,8% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Besarnya persentase dan jumlah pengguna internet di Indonesia semakin menguatkan urgensi adanya literasi digital di Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, Kominfo memiliki program Literasi Digital yang muncul dari kekhawatiran terhadap besarnya potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, *cyberbullying* dan *online radicalism*. Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) dengan anggaran Rp1,6 triliun pada Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi hanya sebesar Rp709,4 miliar atau 43,39%. Program ini dilakukan pada 514 Kabupaten dan Kota. Dalam melakukan program Literasi Digital, Kominfo memiliki Roadmap Literasi Digital Tahun 2020-2024 dimana

2022

Komisi I

didalamnya terdapat kerangka literasi digital dimana kompetensi masyarakat dibagi menjadi 4 yaitu *Digital Skills*, *Digital Culture*, *Digital Ethics*, dan *Digital Safety*.

Kominfo memiliki pengukuran literasi digital yaitu dengan Indeks Literasi Digital yang disusun bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Indonesia sebesar 3,47 dengan *range* indeks 0-5. Lalu terdapat peningkatan pada tahun 2021 yaitu Indeks Literasi Digital Indonesia sebesar 3,90 atau dengan predikat Baik. Skor tersebut terdiri dari skor *Digital Culture* sebesar 3,52, skor *Digital Ethics* sebesar 3,53, skor *Digital Safety* sebesar 3,44, dan skor *Digital Safety* sebesar 3,10.

Pelaksanaan program Literasi Digital dibagi menjadi 12 paket wilayah, yaitu sebagai berikut:

Tabel. Rincian Paket Pekerjaan Literasi Digital TA 2021

Paket Pekerjaan	Cakupan Kab/Kota	Penyedia	Nilai Kontrak
Paket I – Jawa Barat I	13	PT BE	44.529.284.764
Paket II – Jawa Barat II	14	PT BE	45.585.560.350
Paket III – Jawa Tengah I	18	PT DA	37.926.031.275
Paket IV – Jawa Tengah II & DI Yogyakarta	22	PT DA	39.123.484.950
Paket V – DKI Jakarta & Banten	14	PT DA	39.805.352.400
Paket VI – Jawa Timur I	14	PT PN	39.231.307.500
Paket VII – Jawa Timur II	24	PT RE	43.645.338.550
Paket VIII – Bali NTB NTT Papua Maluku	104	PT RE	61.248.636.900
Paket IX – Sulawesi	81	PT DP	49.693.573.360
Paket X – Kalimantan	56	PT AP	38.413.446.500
Paket XI – Sumatera I	77	PT PCI	59.140.227.400
Paket XII – Sumatera II	77	PT AP	64.871.427.500
TOTAL	514		563.213.671.449

Sumber: LHP PDDT Belanja Kemenkominfo TA 2021, diolah

Pada pelaksanaan program tersebut, terdapat banyak kendala pada proses perencanaan, pelelangan program, dan pelaksanaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan dalam Program Literasi Digital

1. Permasalahan pada Perencanaan Program Literasi Digital

Berikut merupakan masalah yang timbul dalam proses perencanaan program Literasi Digital:

- A. Kominfo menentukan target masyarakat yang akan mendapatkan literasi digital adalah 50 juta orang dalam empat tahun yang berasal dari 30% dikalikan jumlah penduduk pengguna internet di Indonesia yang pada saat perhitungan adalah sebanyak 196 juta penduduk. Namun keputusan tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak merinci pengguna internet pasif dan aktif, tentunya pengguna internet aktif seharusnya menjadi sasaran utama dari program ini.
- B. Literasi Digital dilaksanakan dengan membagi paket pekerjaan berdasarkan wilayah. Namun pelaksanaan direncanakan bersifat *virtual* melalui aplikasi Zoom. Dengan penggunaan aplikasi Zoom dalam pelaksanaan program, seharusnya tidak diperlukan adanya pemisahan wilayah, karena *Zoom Meeting* tidak mengenal adanya batas wilayah.
- C. Target peserta adalah *unique participant* yaitu orang yang berbeda di setiap sesi Literasi Digital, namun tidak disiapkan metode untuk pendataan peserta yang dapat

mendukung pembuktian *unique participant*. Maka dimungkinkan peserta dapat mengikuti beberapa sesi Literasi Digital dan target 50 juta peserta dimungkinkan tidak akan diikuti oleh 50 juta *unique participant*.

- D. Perencanaan kebutuhan studio tidak dilakukan dengan benar. Terdapat perbedaan perhitungan kebutuhan studio di paket pekerjaan Pulau Jawa 1 s.d. 7 yang menggunakan jumlah kabupaten dengan Pulau Jawa 8 s.d. 12 yang hanya menyewa sepuluh studio.
- E. Perencanaan kebutuhan personil tidak dilakukan dengan benar. Kegiatan ini membutuhkan personil dengan kategori *Runner*, staf administrasi, dan *liaison officer* (LO). Tidak terdapat acuan untuk menyusun rencana kebutuhan personil yang mengakibatkan perbedaan cara perencanaan pada setiap paket pekerjaan.

2. Permasalahan pada Pelaksanaan Lelang Program Literasi Digital

- A. Terdapat perubahan Harga Satuan pada lelang pertama yang gagal dengan lelang kedua pada *item* studio dan peralatan *live streaming system*, *Gimmick*, sewa kendaraan roda 4, biaya promosi, gaji *leader*, dan gaji *runner*. Hal ini mengindikasikan PPK tidak melakukan survei harga pasar.
- B. Pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi lelang dimana salah satu persyaratan peserta lelang adalah menyampaikan laporan keuangan dan memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% dari nilai HPS, namun hal tersebut tidak terpenuhi pada 3 paket yaitu Paket XI – Sumatera I oleh PT PCI dengan SKN hanya 47,9%, Paket I – Jawa Barat I oleh KSO PT BE dengan SKN hanya 35,8%, dan Paket XII – Sumatera II oleh PT AP dengan SKN hanya 35,8%.

3. Permasalahan pada Pelaksanaan Program Literasi Digital

- A. Perubahan KPI yaitu dari target peserta berdasarkan peserta unik (*unique participant*) menjadi berdasarkan pendaftaran peserta unik (*unique registered participant*) tanpa dituangkan dalam ruang lingkup pekerjaan tiap Paket. Hal ini terjadi karena terdapat target *unique participant* minimal per bulan dan jika tidak tercapai akan diberikan surat peringatan I dan II hingga pemutusan kontrak.
- B. Target capaian KPI yaitu minimal 80% pada Termin I dan II tidak tercapai seluruhnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Persentase Capaian KPI Per Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan	Termin (%)							Akumulasi (%)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Paket I – Jawa Barat I	33,2	82,7	122,3	199,1	80,1	88,5	96,9	100,4
Paket II – Jawa Barat II	15,9	43,4	169,8	191,7	123,1	77,1	79,8	100,1
Paket III – Jawa Tengah I	12,9	36,8	259,2	207,0	110,0	149,7	110,5	126,6
Paket IV – Jawa Tengah II & DI Yogyakarta	14,6	36,3	299,7	227,7	135,7	192,9	54,9	137,4
Paket V – DKI Jakarta & Banten	13,7	45,8	232,9	216,7	167,6	139,7	68,4	126,4
Paket VI – Jawa Timur I	24,6	63,1	190,8	177,4	139,8	139,6	111,8	121,0
Paket VII – Jawa Timur II	40,7	132,9	146,4	131,4	154,0	172,0	150,2	132,5
Paket VIII – Bali NTB NTT Papua Maluku	22,5	101,8	140,6	214,2	126,2	87,8	57,5	107,2
Paket IX – Sulawesi	21,8	104,6	191,9	151,3	135,1	136,4	113,5	122,1
Paket X – Kalimantan	2,8	43,0	212,1	246,7	123,0	144,0	54,2	118,0
Paket XI – Sumatera I	24,0	88,4	196,7	256,0	169,1	88,4	47,4	124,3
Paket XII – Sumatera II	1,6	20,7	160,7	237,0	120,4	122,0	112,8	110,8

Sumber: LHP DTT Belanja Kemenkominfo TA 2021, diolah

4. Permasalahan pada Akses Internet

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan literasi digital adalah dengan metode *online* atau dalam jaringan (*daring*) melalui webinar dengan aplikasi Zoom. Namun belum meratanya koneksi internet diberbagai wilayah di Indonesia khususnya wilayah 3T menjadi kendala yang serius untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan literasi digital kepada masyarakat. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) yang masih belum merata menjadi faktor kesenjangan akses internet di beberapa wilayah.

Saran Perhatian

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, diharapkan Komisi I DPR RI dapat mendorong perbaikan pelaksanaan program Literasi Digital yaitu dengan melakukan:

1. Komisi I DPR RI mendorong Kominfo untuk menyusun pedoman pelaksanaan Program Literasi Digital dengan detil dan lengkap.
2. Komisi I DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Kominfo terkait Program Literasi Digital agar mendapatkan laporan komprehensif pelaksanaan program Literasi Digital.
3. Komisi I DPR RI mendorong Kominfo untuk mempercepat pelaksanaan program Palapa Ring dan pemasangan *Base Transceiver Station* (BTS) di lokasi *Blankspot* untuk memberikan pemerataan koneksi internet di Indonesia.

Referensi

BPK RI. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 (01 Januari 2021 s.d. 31 Oktober 2021) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. Roadmap Literasi Digital 2020-2024. Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. Status Literasi Digital Indonesia Survei di 34 Provinsi November 2020. Indonesia

Kemenkominfo. 2022. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Komisioner KPI Pusat, Komisioner KI Pusat serta, Anggota Dewan Pers.